



RANCANGAN AWAL
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

TAHUN 2022



Jakarta
Public Policy
Center

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Secara substansi, dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 memuat hasil evaluasi Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta rencana kerja dan pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala BPSDM Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP. 197812131997111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	I-1
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	II-8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-36
3.3. Program dan Kegiatan	III-37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-39
BAB V PENUTUP	V-66

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2022. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2022 dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
31. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
33. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
36. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
37. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
38. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
39. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
40. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
41. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2022 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparaturnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (n-1); analisis kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2020. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2020. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2022.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Landasan penggunaan program tahun 2020 adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Terdapat 2 (Dua) program utama yang diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu program Pengembangan Kompetensi SDM, Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program “Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Realisasi capaian program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) indikator, antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator realisasi capaian sesuai dengan target, dan 2 (dua) indikator realisasi capaian melebihi target.

Tabel 2.1 Isian Hasil Evaluasi Renja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia s/d Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)						
2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13					
A 5																
A 5	03															
A 5	03	02														
A 5	03	02	1.03													
A 5	03	02	1.03	04												
A 5	03	02	1.03	04	001	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	Jumlah peserta Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	511	219	100	100	100	100	419	82,00%	
A 5	03	02	1.03	04	000	Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar	Jumlah peserta Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar	630	541	0	0	100	0	541	85,87%	
A 5	03	02	1.03	04	000	Diklat Internship terkait Kerjasama Sister City	Jumlah laporan peserta yang mengikuti Diklat Internship terkait Kerjasama Sister City	10	0	0	0	100	0	0	0,00%	
A 5	04															
A 5	04	02														
A 5	04	02	1.01													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)							
2							3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
A	5	04	02	1.01	02		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
A	5	04	02	1.01	001		pengembangan e-learning	Jumlah pengembangan e-learning	23	10	5	5	100	5	20	86,96%	
A	5	04	02	1.01	002		Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Grand Design Jakarta Corporate University	2	0	1	1	100	1	2	100,00%	
A	5	04	02	1.01	003		penyusunan kurikulum diklat	Jumlah penyusunan kurikulum diklat	23	11	5	5	100	3	19	82,61%	
A	5	04	02	1.01	004		Penyusunan Modul Diklat	Jumlah penyusunan modul diklat	108	62	12	12	100	10	84	77,78%	
A	5	04	02	1.01	000		master plan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah master plan pengembangan kompetensi ASN	2	1	0	0	100	0	1	50,00%	
A	5	04	02	1.01	003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)							
2		3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13					
		Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
A	5	04	02	1.01	003	001	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peserta Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810	570	0	0	100	120	690	85,19%	
A	5	04	02	1.01	003	002	Diklat Manajemen BLUD	Jumlah Peserta Diklat Manajemen BLUD	960	420	0	0	100	270	690	71,88%	
A	5	04	02	1.01	003	003	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	390	180	30	30	100	90	300	76,92%	
A	5	04	02	1.01	003	004	Diklat Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Diklat Komunikasi Publik	550	270	30	30	100	150	450	81,82%	
A	5	04	02	1.01	003	005	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	560	360	0	0	100	120	480	85,71%	
A	5	04	02	1.01	003	006	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	Jumlah Peserta Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	480	300	0	0	100	90	390	81,25%	
A	5	04	02	1.01	003	007	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	750	600	0	0	100	90	690	92,00%	
A	5	04	02	1.01	003	008	Diklat Manajemen Proyek	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Proyek	220	120	0	0	100	60	180	81,82%	
A	5	04	02	1.01	003	009	Diklat Manajemen Strategik	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Strategik	190	90	0	0	100	60	150	78,95%	
A	5	04	02	1.01	003	010	Diklat Change Management and Inovation	Jumlah Peserta Diklat Change Management and Inovation	330	180	0	0	100	90	270	81,82%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)			
2		3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13	
A	5 04	0 1.0 00 01 2 1 3 1	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Peserta Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	590	390	0	0	100	120	510	86,44%	
A	5 04	0 1.0 00 01 2 1 3 2	Pengiriman Kediklatan	Jumlah Peserta Pengiriman Kediklatan	726	898	140	140	100	48	1086	149,59%	
A	5 04	0 1.0 00 01 2 1 3 3	Seminar International	Jumlah Peserta Seminar Internasional	130	0				200	200	153,85%	
A	5 04	0 1.0 00 01 2 1 3 4	Webinar Urban Regeneration	Jumlah yang mengikuti Webinar Urban Regeneration	130	0				200	200	153,85%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah peserta diklat pengelolaan penatausahaan keuangan	510	300					300	58,82%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta diklat penyelesaian sengketa hukum bagi panitia pengadaan barang dan jasa	210	180					180	85,71%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Management	Jumlah peserta diklat teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate management	630	600					600	95,24%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik	Jumlah peserta Workshop profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik	810	750					750	92,59%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia	Jumlah peserta diklat manajemen sumber daya manusia	450	420					420	93,33%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Sekretaris	Jumlah peserta Diklat Sekretaris	420	360					360	85,71%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Keprotokolan	Jumlah peserta diklat keprotokolan	270	240					240	88,89%	
A	5 04	0 1.0 00 00 2 1 3 0	Diklat Bina Damai	Jumlah peserta Diklat Bina Damai	630	600					600	95,24%	

Kode							Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)	
2							3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
A	5	04	02	1.01	00	00	Diklat Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta Diklat Reformasi Birokrasi	180	0				10	0	0,00%	
A	5	04	02	1.01	00	00	Bimtek Pengelolaan Aset	Jumlah peserta diklat/bimtek pengelolaan aset	250	0				10	0	0,00%	
A	5	04	02	1.01	00	00	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah peserta diklat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	30	0				10	0	0,00%	
A	5	04	02	1.01	00	00	Kerjasama Kediklatan	Jumlah peserta Kerjasama Kediklatan	1.350	1.150				10	1150	85,19%	
A	5	04	02	1.01	00	00	Diklat Teknis Perundang-Undangan	Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	330	300				10	300	90,91%	
A	5	04	02	1.01	00	00	Diklat Revolusi Mental	Jumlah peserta diklat revolusi mental	180	150				10	150	83,33%	
A	5	04	02	1.01	00	00	Diklat Pelayanan Prima	Jumlah peserta diklat pelayanan prima	960	900				10	900	93,75%	
A	5	04	02	1.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
A	5	04	02	1.02	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)							
2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13						
	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional																
A	5	04	0 2	1.0 2	01 00	00 1	Penyusunan analisa kesenjangan kompetensi	Jumlah penyusunan analisa kesenjangan kompetensi	4	2	0	0	100	1	3	75,00%	
A	5	04	0 2	1.0 2	01 00	00 2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi	20	8	4	4	100	4	16	80,00%	
A	5	04	0 2	1.0 2	01 00	00 0	konsultasi pengembangan kompetensi	Jumlah peserta konsultasi pengembangan kompetensi	15	10	0	0	100		10	66,67%	
A	5	04	0 2	1.0 2	01 00	00 0	Pemetaan Kompetensi Pegawai	Jumlah peserta Pemetaan Kompetensi Pegawai	600	600	0	0	100		600	100,00%	
A	5	04	0 2	1.0 2	03		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota										
A	5	04	0 2	1.0 2	03 00	00 1	Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	Jumlah peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	4.700	1.414	600	600	100	1.100	3114	66,26%	
A	5	04	0 2	1.0 2	04		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)							
2		3		4		5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13			
A	5	04	02	1.02	04	001	Peningkatan Kompetensi Widyaiswara	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Widyaiswara	33	33	0	0	100	33	66	200%	
A	5	04	02	1.02	04	002	Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015	Jumlah penjaminan mutu dan SMM ISO 9001:2015	6	2	1	1	100	2	5	83,33%	
A	5	04	02	1.02	04	003	Akreditasi Kediklatan	Terlaksananya kegiatan akreditasi kediklatan	15	6	2	2	100	5	13	86,67%	
A	5	04	02	1.02	04	004	Knowledge Management	Jumlah knowledge management	30	10	5	5	100	5	20	66,67%	
A	5	04	02	1.02	04	000	Diklat Penulisan Karya Ilmiah bagi Widyaiswara	Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Ilmiah bagi Widyaiswara	60	30	0	0	100	30	50,00%		
A	5	04	02	1.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
A	5	04	02	1.02	07	001	Diklat Bendahara Penerimaan	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	120	30	30	30	100	30	90	75,00%	
A	5	04	02	1.02	07	002	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah peserta diklat penyidik pegawai negeri sipil	307	270	12	12	100	15	297	96,74%	
A	5	04	02	1.02	07	003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. III	360	270	30	30	100	30	330	91,67%	
A	5	04	02	1.02	07	004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. IV	600	450	60	60	100	60	570	95,00%	
A	5	04	02	1.02	07	005	Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III	3.652	2.858	2	2	100	400	3260	89,27%	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)		
2		3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 6	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi	930	540	0	0	100	300	840	90,32%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	diklat Dasar Pol PP bagi Staf	Jumlah yang mengikuti diklat Dasar Pol PP bagi Staf	270	240					240	88,89%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Manajemen Sekolah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Manajemen Sekolah	330	300					300	90,91%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Kepala Sekolah	Jumlah peserta diklat calon kepala sekolah	1.260	900					900	71,43%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Pengawas Sekolah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengawas Sekolah	90	60					60	66,67%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)	Jumlah peserta diklat prajabatan golongan I, II dan III (K1/K2)	3.031	3.006					3006	99,18%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Capacity Building	Jumlah peserta diklat capacity building	420	390					390	92,86%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah peserta diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri	30	0					0	0,00%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Kepemimpinan Kepala Sekolah	Jumlah peserta diklat kepemimpinan kepala sekolah	60	0					0	0,00%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang Daerah	930	900					900	96,77%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat Bendahara Pengeluaran	810	780					780	96,30%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat TOF/TOC	Jumlah peserta diklat TOF/TOC	60	30					30	50,00%	
A	5 04 0 1.0 07 00 2 2 0	Diklat Training Officer Course	Jumlah peserta diklat Training officer course	60	30					30	50,00%	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)	
2							3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
A	5	04	02	1.0	07	00	Diklat Training of Trainer	Jumlah peserta diklat Training of Trainer	90	60					60	66,67%	
A	5	04	02	1.0	07	00	Diklat Teknis Pertanahan	Jumlah yang mengikuti diklat teknis pertanahan	630	600					600	95,24%	
A	5	04	02	1.0	07	00	Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	Jumlah yang mengikuti diklat dasar kereta api perkotaan	120	90					90	75,00%	
A	5	04	02	1.0	07	00	Diklat Kereta Api Perkotaan (Penguji)	Jumlah yang mengikuti Diklat Kereta Api Perkotaan (Penguji)	120	90					90	75,00%	
A	5	04	02	1.0	07	00	Diklat Hukum Konstruksi	Jumlah peserta Diklat Hukum konstruksi	120	90					90	75,00%	
A	5	04	02	1.0	07	00	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah peserta diklat pengelolaan arsip dinamis	90	60					60	66,67%	
A	X	XX	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										
A	X	XX	01	1.0	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
A	X	XX	01	1.0	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
A	X	XX	01	1.0	02	00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	4	4	4	4	100	4	4	100	
A	X	XX	01	1.0	02	00	Penyediaan Peralatan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	4	4	4	4	100	4	4	100	
A	X	XX	01	1.0	02	00	Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Barang Pakai Habis	4	4	4	4	100	4	4	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket													
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)														
2		3		4		5		6		7		8		9=(7/6)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)		13		
A	X	XX	01	1.08																				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
A	X	XX	01	1.08	02																			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
A	X	XX	01	1.08	02	001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100			
A	X	XX	01	1.08	03																			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
A	X	XX	01	1.08	03	001	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	4	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100			
A	X	XX	01	1.08	04																			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
A	X	XX	01	1.08	04	001	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	4	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100			
A	X	XX	01	1.08	04	002	Penyediaan Jasa Bidang Teknis dan Penunjang	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Bidang Teknis dan Penunjang	4	4	4	4	100	4	4	4	100	4	4	4	100			
A	X	XX	01	1.08	04	000	Pengadaan Jasa Pencucian Linen	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Jasa Pencucian Linen																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)							
2		3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13					
A	X	XX	0 1	1.0 9													
A	X	XX	0 1	1.0 9	02												
A	X	XX	0 1	1.0 9	02	00 1	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO yang berfungsi dan laik jalan	4	4	4	4	100	4	4	100	
A	X	XX	0 1	1.0 9	02	00 2	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah unit KDO yang Dokumen perizinannya lengkap dan berlaku serta laik jalan dan berfungsi	4	4	4	4	100	4	4	100	
A	X	XX	0 1	1.0 9	06												
A	X	XX	0 1	1.0 9	06	00 1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	4	4	4	4	100	4	4	100	
A	X	XX	0 1	1.0 9	09												
A	X	XX	0 1	1.0 9	09	00 1	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas PJLP Kebersihan	4	4	4	4	100	4	4	100	

Kode							Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Ket
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)	
2							3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
A	X	XX	01	1.09	09	002	Penyediaan perlengkapan Petugas PJLP Kebersihan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4	4	4	4	100	4	4	100	
A	X	XX	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD										
A	X	XX	01	1.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
A	X	XX	01	1.10	01	001	Peningkatan Layanan Umum Daerah	Jumlah Peserta Peningkatan Layanan Umum Daerah	270	0	30	30	100	140	170	62,96%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disajikan beberapa tingkat capaian pada program pengembangan kompetensi SDM untuk pendukung diklat.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disesuaikan menurut format Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2020

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta**

NO	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1				NIHIL									
2													
3													
4													

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Sebagaimana diketahui, pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik serta menyelesaikan permasalahan merupakan tuntutan masyarakat sekaligus sebagai isu strategis dalam RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan dengan standarisasi tinggi menjadi tuntutan masyarakat yang lebih luas. Dengan kedudukan yang demikian, DKI Jakarta menjadi barometer bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dalam mengelola birokrasi dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, agenda reformasi birokrasi menjadi salah satu penopang utama berhasil tidaknya upaya memperbaiki layanan publik dalam kerangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan birokrasi yang lebih akuntabel. Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi DKI Jakarta selama ini yang harus terus diperbaiki guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi serta membenahan budaya kerja yang mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan ibukota bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan kompetensi aparatur oleh BPSDM menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menyejahterakan.

Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPSDM dan dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Strategi untuk mencapai tujuan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dihasilkan dari hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) untuk memahami peta kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dan eksternal. Strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BPSDM dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur DKI Jakarta.

Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Tujuan RPJMD	
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	
Sasaran RPJMD	
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kompetensi SDM petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. 2. Mengembangkan sistem kinerja manajemen ASN. 3. Mewujudkan jiwa korps anggota KORPI DKI Jakarta. 4. Peningkatan kompetensi SDM. 5. Peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memacu Pemerataan Pembangunan. 2. Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas 3. Memacu Pertumbuhan Berkualitas 4. Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan 5. Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas.

Dengan memerhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, dirumuskan strategi Renstra BPSDM Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, dan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Kedua strategi tersebut merupakan representasi dari tugas dan fungsi BPSDM yang diselenggarakan oleh seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan BPSDM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi BPSDM



1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

Guna mengantisipasi setiap tantangan dan tuntutan pelayanan publik aparatur DKI Jakarta maka peran pengembangan kompetensi menjadi sangat strategis, melalui berbagai jenis kediklatan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan sebagainya; termasuk sertifikasi profesi SDM. Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pengembangan kompetensi SDM Aparatur dimaksudkan agar penyelenggaraan, antara lain, diklat di lingkungan BPSDM semakin dapat memenuhi kebutuhan (pengembangan) kompetensi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam volume atau kapasitas layanan disertai peningkatan mutu yang semakin baik (excellent).

Hal paling mendesak dari perbaikan kinerja bidang pengembangan kompetensi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas layanan berupa peningkatan peserta diklat di berbagai jenis diklat yang diselenggarakan maupun peningkatan jenis diklat itu sendiri sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu, terdiri dari :

- a. Pengembangan Kompetensi Manajerial; meliputi: Diklat Kepemimpinan Tingkat I; Reform Leader Academy; Diklat Kepemimpinan Tingkat II; Diklat Kepemimpinan Tingkat III; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; dan Diklat Manajerial lainnya.
- b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; meliputi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan beberapa penunjang urusan pemerintahan. Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan melalui Diklat Fungsional, yaitu diklat pembentukan jabatan fungsional dan diklat penjenjangan jabatan fungsional.
- c. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan; yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pegawai di setiap OPD. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.
- d. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.

Untuk meningkatkan kompetensi dalam jabatan tersebut di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai dengan swasta, bimbingan teknis, sosialisasi, tugas belajar, workshop dan coaching untuk setiap jajaran dalam struktur organisasi BPSDM. Pengembangan kompetensi ini dilakukan untuk menambah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pegawai yang profesional sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Proses pengembangan karir dalam suatu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemetaan kebutuhan diklat dan target rekrutmen peserta diklat;
 - b. Peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM;
 - c. Adanya kerja sama pengembangan kompetensi SDM dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan dan Sektor Publik;
 - d. Penetapan standar kompetensi pada seluruh jabatan (JFT dan non JFT)
 - e. Peningkatan kualitas uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
2. Optimalisasi Dukungan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi Berstandar Global

Agar pengembangan kompetensi menghasilkan SDM aparatur (alumni diklat) yang semakin professional dalam mengemban tugas dan fungsi organisasi di masing-masing OPD maka bidang pengembangan kompetensi harus didukung dengan kapasitas kelembagaan yang berstandar tinggi, termasuk upaya-upaya penjaminan mutunya. Strategi optimalisasi dukungan kelembagaan dan peningkatan mutu pengembangan kompetensi berstandar global pada dasarnya dimaksudkan untuk menghantarkan layanan BPSDM berkelas internasional sebagaimana apa yang dimaksud sebagai government university.

Manajemen SDM harus dilakukan secara profesional. BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai unit kerja yang bertugas melakukan peningkatan kompetensi pegawai, harus menyelenggarakan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan motivasi, penyegaran dan pengembangan kompetensi dan kapasitas serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai abdi negara di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan standarisasi dan penjaminan mutu dimaksudkan untuk dapat mendukung layanan yang diselenggarakan oleh bidang pengembangan kompetensi melalui perbaikan prosedur perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang standarisasi penjaminan mutu agar peserta diklat dapat direkrut semakin banyak dengan pengerahan sumber daya organisasi yang semakin efisien.

Upaya-upaya dimaksud juga termasuk memanfaatkan seoptimal mungkin kearifan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pengelolaan diklat (termasuk pelaksanaan), mulai dari persiapan, pendaftaran hingga diklat berakhir. Untuk terus mengenali berbagai area perbaikan atau peningkatan kualitas diklat, hal penting yang dilakukan adalah terus memperbaiki atau mengefektifkan monitoring dan evaluasi, tidak saja pada keseluruhan proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM melalui bidang-bidang pengembangan; tak kalah penting juga memantau dampak diklat terhadap kinerja dan perbaikan layanan pegawai DKI Jakarta.

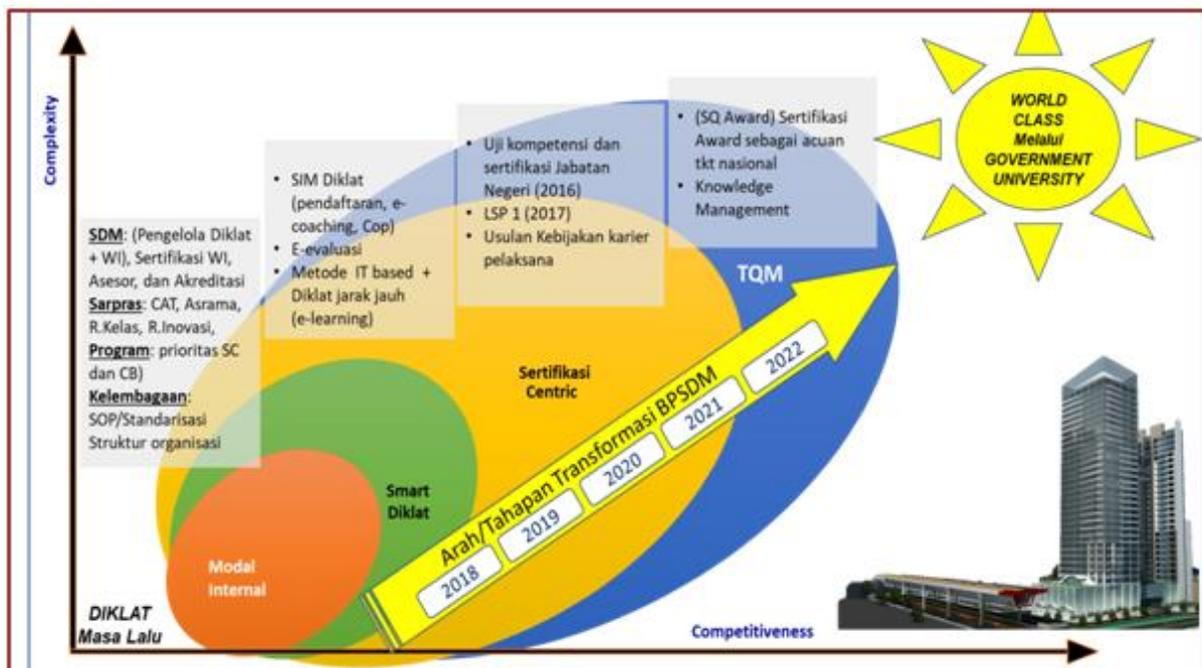
Upaya atau dukungan lain yang tak kalah penting adalah dalam pengembangan kapasitas lembaga yaitu rangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, dan efisien; termasuk upaya-upaya berkelanjutan agar BPSDM menjadi institusi pengembang SDM berskala internasional. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang perumusan strategi dan program BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kapasitas kelembagaan dalam hal ini mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Kapasitas Kelembagaan Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga pengembangan SDM diharapkan kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan perangkat daerah serta pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu hal yang terpenting dalam pemberdayaan kapasitas kelembagaan adalah menyangkut aspek kepegawaian, dimana kondisi pembinaan pola karier aparatur saat ini tidak didasarkan pada standar kompetensi baik persyaratan umum, persyaratan manajerial, dan persyaratan teknis, sehingga berdampak kurang positif terhadap kinerja instansi serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Pembentukan kelembagaan perangkat daerah, dapat dibentuk sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik daerah, kebijakan yang diambil salah satunya adalah menjadikan UPT PSPP menjadi BLUD.

Dari segenap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM, hal paling mendesak dan menjadi urgent adalah penyediaan gedung diklat terpadu yang hingga saat ini masih belum terwujud; yang antara lain adalah untuk meningkatkan tampungan peserta dalam bentuk penambahan kelas, asrama, dan lain-lain. Penyediaan gedung terpadu dimaksud juga secara langsung menjadi pemicu kinerja widyaiswara agar dapat menjalankan tugas dan fungsi menjadi lebih baik karena antara lain perpindahan ruang mengajar dari satu acara kelas ke kelas berikutnya menjadi lebih efisien.

Gambar 2.2
Arah Tranformasi BPSDM 2017-2022



Melihat segala sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tampak pada gambar di atas dapat dipastikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan pusat pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional (world class melalui government university). Pada gambar tersebut tampak pula bahwa kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus meningkat pesat, mulai dari diklat masa lalu yang sederhana kemudian dikembangkan sedemikian rupa dengan segala modal internal yang dimiliki (SDM: Pengelola Diklat + WI; Sertifikasi WI, ASKLAT, dan Akreditasi; Sarpras: CAT, Asrama, R.Kelas, R.Inovasi; Program:

prioritas SC dan CB; Kelembagaan: SOP/Standarisasi Struktur organisasi) menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi smart diklat melalui berbagai pelaksanaan diklat berbasis IT (SIM Diklat: pendaftaran, e-coaching, Cop; E-evaluasi; Metode IT based; Diklat jarak jauh (e-learning). Keberhasilan ini didukung pula dengan diperolehnya sertifikasi centric melalui pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan negeri (2016); LSP 1 (2017); usulan kebijakan karier pelaksana; (SQ Award) Sertifikasi Award sebagai acuan tingkat nasional serta pengembangan knowledge management.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program prioritas BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 antara lain :

- I. Program pengembangan kompetensi SDM
 - Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional
 - Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial
 - Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial cultural
 - Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi
- II. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan diklat
 - Akreditasi pengelolaan diklat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian untuk BPSDM tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi DKI Jakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP Tahun 2021 adalah RKP transisi, menunggu RPJMN Tahun 2020-2024 selesai disusun, sehingga dalam menentukan struktur prioritasnya menggunakan RKP sebelumnya.

Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2021 antara lain yaitu:

1. Pembangunan manusia;
2. Penguatan konektivitas;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional.

Merujuk kepada lima prioritas tersebut, ada/tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. 1 tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 16 :

Goals 16 – Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh – mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020, secara berurutan yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas”. Sehingga tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia_Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta	Terwujudnya SDM pimpinan tinggi, administrator & pengawas yang berkompeten serta mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta	Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi	32,40 %	33,20 %	34,00 %	34,80 %	36,00 %
2	Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi (indikator tujuan: Nilai Rata-rata Kepuasan Peserta Diklat)	Terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang berkualitas	Nilai Rata-rata Kepuasan Peserta Diklat (Diklat PIM III, Diklat Pengelola Barang Daerah, & Diklat Pelayanan Prima)	92,50 %	93,00 %	93,50 %	94,00 %	94,50 %

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tabel 3.1 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2021, maka prioritas kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2021 antara lain:

1. Program pengembangan kompetensi SDM;
2. Revitalisasi pengembangan sumber daya apartur
3. Pembentukan UPT – BLUD kebijakan publik dan pembangunan perkotaan

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja 2022 menggunakan program yang terdapat di Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017-2022 terdiri 4 program utama dan 2 program operasional. Program tersebut antara lain:

1. Program Pengembangan Kompetensi SDM;
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 beserta Perkiraan Maju Tahun 2023 BPSDM terdapat dalam Tabel 3.2. Pada tahun 2022 terdapat 3 Program, 7 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan, serta 91 Indikator Kinerja sub kegiatan pada 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 2 UPT (termasuk UPT PPKKP yang berupa BLUD JPPC) :

1. Urusan Kepegawaian, digunakan bersama oleh BPSDM dan BKD
 - a. Program Kepegawaian Daerah
2. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selain itu terdapat 1 (satu) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu

3. Urusan A.X.XX XX
 - a. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan
Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022



**Tabel 4.1 . Isian Rancangan Awal Tahun 2022
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta**

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	03					KEPEGAWAIAN								
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi		85%				85%	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	03	02	1	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		82 Persentase				82 Persentase	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	03	02	1	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pengiriman tugas belajar	Provinsi DKI Jakarta	100 Orang	20,490,892,398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	25,000,000,000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	03	02	1	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah peserta Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	142.338.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Akreditasi Pengelolaan Diklat		1 jenis diklat				1 jenis diklat	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis		60 persen				60 persen	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Grand Design Jakarta Corporate University	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1,605,097,560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	1,101,894,449	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah penyusunan kurikulum diklat	Provinsi DKI Jakarta	4 Jenis	114.878.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Jenis	150.000.000	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah penyusunan modul diklat	Provinsi DKI Jakarta	24 Modul	183.136.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Modul	200.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pengembangan e-learning	Provinsi DKI Jakarta	3 Modul e-Learning	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengembangan Mobile Apps BPSDM pada Play Store Google	1 Modul e-Learning	350.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		48 persen				48 persen	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah penyusunan analisa kesenjangan kompetensi	Provinsi DKI Jakarta	1 TNA	198,525,466	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 TNA	154,138,012

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi	Provinsi DKI Jakarta	4 Standar	138.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Standar	140.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial		65%				65%	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		48 persen				48 persen	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan I, II dan III	Provinsi DKI Jakarta	400 orang	37,412,932,532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400 orang	40.000.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PKP)	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	6.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 orang	6.000.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	1.800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 orang	1.900.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Kepala Sekolah	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	3.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 orang	4.000.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Pengawas Sekolah	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 orang	450.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 orang	25.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output))	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Provinsi DKI Jakarta	10 orang	850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 orang	850.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	Provinsi DKI Jakarta	60 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 orang	250.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PKA)	Provinsi DKI Jakarta	30 orang	1.800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 orang	2,801,558,848
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural		57%				57%	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis		60 persen				60 persen	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Jabatan Fungsional	Provinsi DKI Jakarta	600 orang	28.331.814.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Restrukturisasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional	600 orang	30.000.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional		68%				68%	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		48 persen				48 persen	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah penjaminan mutu dan SMM ISO 9001:2015	Provinsi DKI Jakarta	1 smm & ISO	594,653,558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 smm & ISO	321,958,113

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah program diklat yang terakreditasi / reakreditasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Diklat	95.498.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Diklat	100.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Widyaiswara	Provinsi DKI Jakarta	10 Orang	338.778.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Orang	400.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah knowledge management	Provinsi DKI Jakarta	3 diklat	12.688.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 diklat	50.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi		74%				74%	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		48 persen				48 persen	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	5	04	02	1	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	Provinsi DKI Jakarta	800 orang	515,795,084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 orang	276,870,000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X						X								

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX					XX								
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor		4 indeks				4 indeks	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 nilai				4 nilai	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN yang sesuai ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	100 persen	64,580,630,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	80,000,000,000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 nilai				4 nilai	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	4,384,818,713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	4.500.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	250.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	1.100.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Diklat	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	3.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	3.400.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	547,568,010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	600.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai kepuasan terhadap layanan fasilitas BBM KDO/KDO Khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	62,128,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	70.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	24,816,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	27,297,600
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	195,097,876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	200.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	826,005,410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	850.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	176,220,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	193,842,000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas jasa bidang teknis dan penunjang tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	1,497,704,183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	1,551,502,180	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan terhadap penyediaan perlengkapan petugas jasa bidang teknis dan penunjang	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Nilai	4.500.000	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas keamanan kantor tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	1.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	1.300.000.000	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan terhadap penyediaan perlengkapan petugas keamanan kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Nilai	100.000.000	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 nilai			4 nilai		
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan terhadap layanan pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	66,791,569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Nilai	73,470,725	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa pajak dan perizinan KDO/KDO Khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	40.000.000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	211,419,769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	232,561,745
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan kinerja petugas jasa kebersihan tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	1,762,108,874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1,826,163,445
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	X	XX	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Perlengkapan Petugas Jasa Kebersihan	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	190.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural		57%				57%	

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis		60 persen				60 persen	
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	Provinsi DKI Jakarta	90 Orang	4,547,110,385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	4.000.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	90 Orang	4.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	4.000.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Proyek	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	95.280.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Strategik	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	80.249.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Pengiriman Kediklatan	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	478.771.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	480.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	210 Orang	176.955.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	200.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Teknis Perundang-undangan	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	485.536.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	490.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Pelayanan Prima	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	231.991.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	250.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Aset	Provinsi DKI Jakarta	250 Orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	519.225.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	520.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Manajemen BLUD	Provinsi DKI Jakarta	270 Orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Bina Damai	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	291.883.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	300.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	85.381.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Sekretaris	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	650.633.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	700.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output))	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Reformasi Birokrasi	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang	337.863.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	350.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	90 Orang	88.406.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Komunikasi Publik	Provinsi DKI Jakarta	150 Orang	233.484.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	250.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Change Management and Inovation	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	130.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Provinsi DKI Jakarta	80 Orang	117.386.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	200.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Seminar International	Provinsi DKI Jakarta	130 Orang	680.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	500.000.000

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Webinar Urban Regeneration	Provinsi DKI Jakarta	130 Orang	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	40.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	Provinsi DKI Jakarta	80 Orang	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	120.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X						X								
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX					XX								

Rencana Kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor		4 indeks				4 indeks	
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 nilai				4 nilai	
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Fasilitasi Penerimaan Tamu Konsultasi, Studi Banding dan Kunjungan Kerja	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	11,642,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Nilai	20.000.000
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD								
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Peserta Peningkatan Layanan Umum Daerah	Provinsi DKI Jakarta	90 Orang	199,879,540	BLUD		30 Orang	291,346,080
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	A	X	XX	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Layanan Umum Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai		BLUD		4 Nilai	

PENUTUP

Penutup Dokumen Renja



PENUTUP

Dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2022. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017-2022 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Fungsi Renja 2022 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta terutama kegiatan “Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Pembentukan UPT-BLUD Kebijakan Publik dan Pembangunan Perkotaan”.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2022 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2023.

Selanjutnya, Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala BPSDM Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP. 197812131997111001